

## DAMPAK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEMUKIMAN (PEMK) TERHADAP KESEJAHTERAAAN KELUARGA DI KABUPATEN BIREUEN

**Cut Khairani<sup>1\*)</sup>**

<sup>1)</sup> Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim Bireuen Aceh

<sup>\*)</sup> Email: cut.fisip13@gmail.com

### ABSTRAK

*Pemilihan judul ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengkaji program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bireuen. Permasalahan penelitian adalah apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan keluarga sebelum dan setelah mendapatkan bantuan program PEMK dan apakah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan setelah diberikan bantuan program PEMK. Tujuannya, untuk mengetahui tingkat pendapatan keluarga peternak sebelum dan setelah mendapatkan bantuan program PEMK di kabupaten Bireuen dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan setelah diberikan bantuan program PEMK di kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode uji jenjang bertanda wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan sesudah mendapat program pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen berada dalam kategori sedang sampai tinggi. Kesejahteraan peternak sebelum dan sesudah mendapat pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman di Kabupaten Bireuen adalah sama. Dengan kata lain bahwa program PEMK berpengaruh tidak nyata terhadap kesejahteraan keluarga peternak sapi di Kabupaten Bireuen.*

**Kata kunci :** Kesejahteraan keluarga Peternak, PEMK, Bireuen

### 1. Pendahuluan

Konsep pemberdayaan tidak lepas kaitannya dengan konsep demokrasi. Karena tujuan utama pemberdayaan adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konsep ini dilandasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang mendasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 adalah menjadi bangsa yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan ber-solidaritas tinggi. Adapun bunyi Pembukaan

UUD 1945, alinea 4 sebagai berikut :  
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Cita-cita ini menggariskan makna sejahtera sebagai sejahtera secara merata. Artinya setiap individu bangsa Indonesia ber-

hak menikmati hidup sejahtera. Mewujudkan kesejahteraan terutama dalam keluarga merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat yang secara eksplisit dituangkan dalam PP 21/1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera.

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah di propinsi Aceh yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) melimpah. Diantaranya adalah luas wilayah yang mencapai 1.901,21 km<sup>2</sup> (190.121 Ha) yang tersebar mulai dari bibir pantai disebelah utara sampai kedataran tinggi pada ketinggian lebih 500 m dari permukaan laut dibagian selatan (BPS Kabupaten Bireuen, 2009). Sebagian besar dari luas wilayah tersebut yakni 87.881 Ha atau 46,22 % merupakan lahan-lahan pertanian yang produktif dan subur. Ditinjau dari potensi sumber daya alam (SDA) tersebut mestinya masyarakat Kabupaten Bireuen berada dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi. Namun, kenyataannya di kabupaten Bireuen masih banyak pula ditemukan masyarakat yang hidup miskin dibawah garis kemiskinan dan masih banyaknya keluarga prasejahtera dan sejahtera tingkat I. Pada tahun 2009 jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera tingkat I di kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 54.951 KK sedangkan persentase angka kemiskinan masyarakat Bireuen dari lima tahun terakhir (2006-2011) menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 26,98 %. Meskipun demikian penurunan angka kemiskinan tersebut terlihat tipis dan lamban (*stalling*).

Indikasi kearah itu juga diperlihatkan dari nilai PDRB (*produk domestik regional Bruto*) yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan di kabupaten Bireuen rata-rata selama lima tahun terakhir tercatat sebesar Rp 2.243.628 angka ini menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan pemikiran dari semua pihak. Jika kondisi ini terus berlanjut maka jumlah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan keluarga prasejahtera serta keluarga sejahtera tingkat I di kabupaten Bireuen akan mengalami kondisi yang berkepanjangan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif dikalangan masyarakat diantaranya tingkat pendidikan kurang memadai bahkan rendah, pelayanan kesehatan

tidak terjangkau, kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat terpenuhi dan tingkat kriminalitas pun meningkat.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan diatas maka pemerintah daerah provinsi Aceh mengucurkan program PEMK (Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman). Program PEMK merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dengan skala prioritas mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program tersebut berpengaruh pula terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Karena apabila masyarakat berdaya maka mereka akan mampu meningkatkan pendapatannya serta cenderung pula dapat mensejahterakan keluarganya.

Berangkat dari permasalahan itu maka sangat perlu ditinjau dan diteliti mengenai "Dampak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK) terhadap Kesejahteraan Keluarga Peternak di kabupaten Bireuen", yaitu apakah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan setelah diberikan bantuan program PEMK.

## 2. Landasan Teoritis

### a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman

Program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) adalah bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif (bertindak bersama) untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya (Suharto, 2004). Sedangkan menurut Poerwanto (2001) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian yang lebih besar dan perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Namun, menurut peneliti "pemberdayaan masyarakat" dimaknai sebagai segala

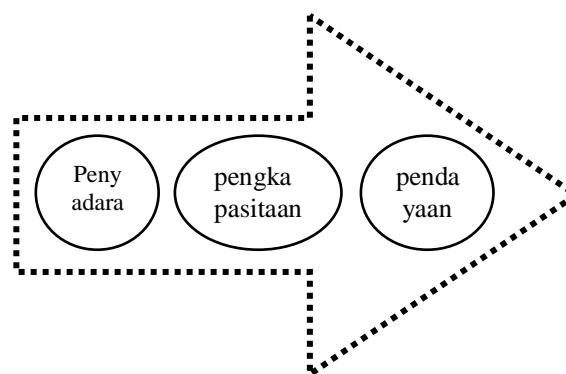
usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan dengan menciptakan perubahan hidup ke arah lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai azas dari, oleh dan untuk masyarakat melalui: (a) keberpihakan kepada masyarakat miskin, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada penduduk miskin, (b) memberi kepercayaan yang luas kepada masyarakat gampong untuk memilih kegiatan yang dibutuhkan baik dalam proses perencanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya, (c) keswadayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di gampong, (d) keterpaduan dalam perencanaan pembangunan antar gampong dalam satu kemukiman, (e) partisipasi dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di kemukimannya, dan (f) pemilihan mukim dan gampong tertinggal dan terisolir untuk dikembangkan.

Pemberdayaan bukanlah sebuah proses instant untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena itu perlu diketahui bahwa pemberdayaan memiliki tiga proses tahapan. Adapun tiga sisi proses tahapan pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut, yakni ; tahapan penyadaran, pengkapasitaan, dan pendayaan. Secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar1.

Tahap pertama adalah penyadaran., di tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya target adalah masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain).

Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitaan. Inilah yang sering kita sebut "*capacity building*", atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan. Untuk diberikan daya yang bersangkutan harus mampu terlebih dulu. Arti dasarnya adalah memberikan kapasitas kepada individu/kelompok manusia untuk mampu menerima daya yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya atau pendayaan. Pada tahap ini kepada target diberikan daya atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prosedur dari ketiga tahap ini, pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.



Gambar 1. Tiga tahapan pemberdayaan  
(Randy R. Wrihatnolo & Rian,2007)

#### b. Kesejahteraan Keluarga

Sejahtera memiliki beragam makna, namun intinya menunjuk pada keadaan (kondisi) hidup yang baik, makmur, aman, sentosa, selamat dan terlepas dari segala kesukaran/kesusahan (hidup susah). Sedangkan keluarga merupakan bagian atau unit terkecil dari masyarakat. Istilah keluarga mengandung makna yaitu Anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah atau perkawinan. Jadi, kesejahteraan keluarga dapat didefinisikan sebagai komunitas terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang tinggal bersama dalam keadaan makmur, sentausa dan hidup berkecukupan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 Bab I ayat 2 *Keluarga sejahtera* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara kelu-

arga dengan masyarakat dan lingkungan. Menurut BKKBN (2009), tahapan keluarga sejahtera terdiri atas:

- 1) Prasejahtera : Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.
- 2) Sejahtera I : Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- 3) Sejahtera II : Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi
- 4) Sejahtera III : Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.
- 5) Sejahtera III plus : Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Berikut adalah indikator yang digunakan BKKBN dalam pentahapan keluarga sejahtera:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) yaitu apabila keluarga tersebut ditinjau dari indikator ekonomi belum memiliki kondisi sebagai berikut: a. Makan dua kali atau lebih sehari, b. Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian), dan c. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. Sedangkan dari indikator Non-Ekonomi belum memiliki kondisi sebagai a. Melaksanakan ibadah, dan b. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 2) Keluarga Sejahtera I (Miskin) yaitu apabila keluarga tersebut ditinjau dari indikator ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator berikut: a. Paling ku-

rang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, dan c. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni. Sedangkan dari indikator Non-Ekonomi belum memiliki kondisi sebagai berikut: a. Ibadah teratur, b. Sehat tiga bulan terakhir, c. Punya penghasilan tetap, d. Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, e. Usia 6-15 tahun bersekolah, dan f. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB.

- 3) Keluarga Sejahtera II yaitu apabila keluarga tersebut ditinjau dari indikator ekonomi/non ekonomi belum dapat memenuhi salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut: a. memiliki tabungan keluarga, b. makan bersama sambil berkomunikasi, c. mengikuti kegiatan masyarakat, d. rekreasi bersama (6 bulan sekali), e. meningkatkan pengetahuan agama, f. memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, dan g. menggunakan sarana transportasi.
- 4) Keluarga Sejahtera III yaitu apabila keluarga tersebut sudah dapat memenuhi beberapa indikator berikut: a. memiliki tabungan keluarga, b. makan bersama sambil berkomunikasi, c. mengikuti kegiatan masyarakat, d. rekreasi bersama (6 bulan sekali), e. meningkatkan pengetahuan agama, f. memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, dan g. menggunakan sarana transportasi. Dan belum dapat memenuhi beberapa indikator, sebagai berikut: (a). aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan (b). aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus yaitu apabila keluarga tersebut sudah dapat memenuhi beberapa indikator diatas serta: a. aktif memberikan sumbangan material secara teratur, b. aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

### 3. Metode Penelitian

#### a. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran sebagai tempat penelitian ini adalah Kecamatan Samalanga, kecamatan Peusangan, dan kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang meliputi 19 gampong. Gampong-gampong terse-

but mendapatkan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK). Program PEMK ini telah berjalan sejak tahun 2007-2009 dengan tujuan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat gampong di tingkat kemukiman.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Bireuen yang mendapatkan program PEMK dalam usaha penggemukan sapi dan mengukur tingkat pendapatan serta tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Adapun waktu penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu 5 (lima) bulan yaitu terhitung dari Oktober 2010 sampai Februari 2011.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Survey yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan (quesioner) yang diberikan berupa pernyataan sekitar pengaruh program Pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) terhadap tingkat kesejahteraan.

Populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang mendapatkan program Pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) di Kabupaten Bireuen. Jumlah populasi yang dimaksud adalah keluarga yang mendapat program PEMK ternak sapi yaitu sebanyak 151 KK. Penetapan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan jumlah sampel mencakup 30 % dari populasi. Perincian keluarga yang mendapat program PEMK di kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perincian populasi KK yang mendapat program PEMK di Kab. Bireuen

No.	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Gampong	Populasi	Sampel
1	Samalanga	Tgk. Chiek Dimatang	2	13 KK	3 KK
2	Peusangan	Tgk. Dikrueng	9	74 KK	22 KK
3	Jeumpa	Kota Jeumpa	8	64 KK	20 KK
TOTAL			19	151 KK	45 KK

Sumber : BPM. Kab. Bireuen (2010)

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang langsung diperoleh dari responden, baik melalui kegiatan wawancara, questioner ataupun angket. Sedangkan data sekunder berasal dari publikasi dan dokumentasi berbagai instansi seperti data

yang diperoleh dari Kantor BPS Kabupaten Bireuen, BKKBN dan BPM Bireuen. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan agar diperoleh data yang objektif, diantaranya: (a). Observasi (Pengamatan), (b). Wawancara, (c). Dokumentasi, dan (d). Questioner (angket).

#### c. Konsep dan Operasional Variabel

Untuk memudahkan analisis maka diperlukan data di setiap variabel yang diukur. Sehubungan dengan pengelempokkan yang telah ditentukan sebelumnya maka variabel-variabel yang diambil dan diamati dalam penelitian ini Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK) sebagai (x) yang memiliki sub variabel yaitu bantuan modal usaha. Bantuan modal ini digunakan untuk usaha ternak sapi. Variabel tersebut merupakan variabel independen, (b) Tingkat kesejahteraan keluarga (y) merupakan variabel dependen.

Berikut ini data lengkap variabel dan sub variabel tersebut adalah :

- (a) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai azas *dari, oleh dan untuk* masyarakat melalui bantuan modal usaha ekonomi produktif yaitu pada usaha penggemukan sapi, dan
- (b) Kesejahteraan Keluarga. Kesejahteraan keluarga menjadi harapan tiap komunitas terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. *Keluarga sejahtera* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, ber-taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan lingkungan sosial. Kesejahteraan keluarga diukur dari pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang berkecukupan.

#### d. Analisis data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data menggunakan teknik analisis statistik non parametris hal ini dikarenakan data penelitian ini merupakan data



ordinal dengan skala interval. Dalam hal ini adalah tingkat kesejahteraan keluarga yang telah mendapatkan program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) di kabupaten Bireuen. Data yang terkumpul selanjutnya di tabulasi dan disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik dan diagram. Untuk keperluan tersebut penulis mengumpulkan dan mengolah data dengan cara memberikan questioner kepada responden dengan pilihan jawaban, antara lain ; SS (sangat setuju), S (setuju), RG (ragu-ragu), TS (tidak setuju), STS (Sangat tidak setuju).

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji jenjang bertanda wilcoxon. Pengujian ini dilakukan dengan pendekatan distribusi normal, mean dan deviasi standar dari distribusi nilai T yang dihitung dengan rumus (Jurwanto, 1996).

$$a. \text{Mean } (\mu_T) = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$b. \text{Deviasi standar } (\delta_T) = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

$$c. \text{Uji statistik } Z = \frac{T - \mu_T}{\delta_T}$$

Keterangan

n = jumlah sampel

T = jumlah peringkat jenjang bertanda negatif.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### a. Profil Umum Lokasi Penelitian

Penelitian tentang dampak pemberdayaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman Terhadap Kesejahteraan Keluarga Peternak di Kabupaten Bireuen meliputi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Peusangan. Ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah yang memperoleh program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2009-2011 dalam bidang peternakan sapi.

##### 1). Kecamatan Samalanga

Luas kecamatan Samalanga adalah 15.622 Ha yang terdiri atas lima kemukiman dan 46 gampong. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Bener Meriah, sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Pidie Jaya dan sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Simpang Mamplam. Dalam kecamatan ini yang menjadi sasaran lokasi penelitian adalah di

kemukiman Tgk. Chiek Dimatang yaitu gampong Cot Mane dan Cot Siren. Adapun karakteristik kedua gampong tersebut telah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2. Karakteristik Gampong Cot Mane dan Cot Siren

No	Nama Gampong	Luas Gampong (Ha)	Jumlah Penduduk		Jumlah Bantuan	
			Jiwa	KK	Sapi (Ekor)	Nilai (Rp)
1	Cot mane	600	311	92	7	45.500.000
2	Cot Siren	1.189	261	65	6	39.000.000
Jumlah			531	157	13	84.500.000

Sumber : BPS. Kab. Bireuen (2010)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah penduduk dalam dua gampong yang menjadi sasaran penelitian di Kec. Samalanga adalah sebanyak 531 jiwa. Jumlah masyarakat tersebut terhimpun dalam 157 KK. Sedangkan jumlah KK yang mendapat program pemberdayaan ini adalah 13 KK dengan jumlah bantuan sapi sebanyak 13 ekor.

##### 2). Kecamatan Jeumpa

Luas Kecamatan Jeumpa adalah 6.942 Ha yang terdiri atas lima kemukiman dan 42 gampong. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Juli, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Peudada dan sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Kota Juang. Gampong-gampong yang menjadi sasaran penelitian ini dalam kecamatan ini meliputi delapan gampong. Karakteristik masing-masing yang telah mendapat program pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dalam Tabel3.

Tabel 3. Karakteristik Gampong di Kecamatan Jeumpa

Nama Gampong	Luas Gampong (Ha)	Jumlah Penduduk		Jumlah Bantuan	
		Jiwa	KK	Sapi (Ekor)	Nilai (Rp)
Alue Limeng	360	389	92	8	30.000.000
Blang seupeung	986	636	169	8	30.000.000
Pulo lawang	150	527	109	8	30.000.000
Cot meugoe	830	319	74	8	30.000.000
Paloh seulimeng	110	517	114	8	30.000.000
Blang gandai	122	980	208	8	30.000.000
Abeuk usong	161	719	167	8	30.000.000
Mon mane	89	444	99	8	30.000.000
Jumlah		4531	1032	64	330.000.000

Sumber : BPS. Kab. Bireuen (2010)

Menurut Tabel 3 diatas diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) gampong dalam kecamatan Jeumpa yang mendapat program pemberdayaan PEMK pada sektor peternakan sapi. Selain itu juga terlihat bahwa jumlah masyarakat dalam wilayah gampong-gam-

pong tersebut mencapai 4531 jiwa yang bernaung dalam 1032 kepala keluarga. Sedangkan kepala keluarga yang mendapat pemberdayaan PEMK yaitu 64 KK dengan jumlah ternak sapi yang diberikan oleh pemerintah mencapai 64 ekor.

### 3). Kecamatan Peusangan

Luas Kecamatan Peusangan adalah 12.242 Ha yang terdiri atas sembilan kemukiman dan 69 gampong. Sebelah Utara berbatasan dengan Jangka, sebelah Selatan berbatasan dengan Peusangan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Juang dan sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Kuta Blang. Adapun gampong-gampong yang menjadi lokasi penelitian adalah di kemukiman *Tgk. Dikruenyakni* pada delapan gampong. Adapun karakteristik gampong tersebut telah dirinci pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Karakteristik Gampong di Kecamatan Peusangan

Nama Gampong	Luas Gampong (Ha)	Jumlah Penduduk		Jumlah Bantuan	
		Jiwa	KK	Sapi (Ekor)	Nilai (Rp)
Gampoeng Putoh	130	593	127	8	45.760.000
Gp. Mns. Nibong	127	361	79	8	45.760.000
Gp. Pante Piyeu	295	928	222	8	45.760.000
Gp. Pante Ara	81	291	63	8	45.760.000
Gp. Kr Baro BB Kr	263	367	77	18	102.960.000
Gp. Kr Baro Mesjid	208	434	91	8	45.760.000
Gp. Mns. Meucap	105	365	82	8	45.760.000
Gampoeng Bayu	125	372	80	8	45.760.000
<i>Jumlah</i>		3711	821	74	423.280.000

Sumber : BPS. Kab. Bireuen (2011)

Menurut Tabel 4 diketahui bahwa jumlah gampong yang memperoleh program pemberdayaan PEMK di Kec. Peusangan meliputi delapan gampong dengan jumlah penduduk 3711 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga yang diberdayakan di Kecamatan ini adalah 821 KK dengan jumlah sapi yang diberikan sebanyak 74 ekor.

### b. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para peternak yang telah mendapat program pemberdayaan PEMK yakni 30 % dari 151 KK yaitu sebanyak 45 KK. Jumlah responden tersebut berbeda di masing-masing kecamatan yang mendapat program pemberdayaan PEMK. Untuk kecamatan Samalanga jumlah responden sebanyak 3 KK. Sedangkan di kecamatan Jeumpa 20 KK dan di Kecamatan Peusangan 22 KK. Karakteristik responden telah disusun dalam questioner sebagaimana

ditunjukkan dalam Lampiran 1. Beberapa karakteristik responden tersebut adalah umur, pendidikan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga dan lapangan pekerjaan.

#### 1). Umur Responden

Umur responden menunjukkan usia responden yang dihitung mulai dari tahun lahir sampai tahun 2010. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa umur peternak yang mendapat program pemberdayaan PEMK adalah berkisar antara 23 tahun sampai dengan 60 tahun. Dengan lain perkataan dapat disampaikan bahwa responden yang tertua adalah 60 tahun dan yang termuda 23 tahun. Sebaran data umur peternak yang mendapat program pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Distribusi Umur Responden

Kisaran Umur (Tahun)	Frekuensi	Persen (%)
23-30	4	9
31-38	6	13
39-46	11	24
47-54	20	45
55-62	4	9
<b>JUMLAH</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Tabel 5 memperlihatkan bahwa 45 % dari peternak yang mendapat program pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen mempunyai umur antara 47-45 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengalaman responden dalam bidang budi daya ternak sapi tergolong sangat lama dan termasuk dalam kategori masih produktif. Sedangkan peternak sapi yang mendapat program pemberdayaan PEMK dengan umur yang tergolong kurang produktif hanyalah 9% saja atau 4 orang.

#### 2). Pendidikan dan Status Kawin

Tingkat pendidikan responden dilihat dari kelulusan pada setiap jenjang pendidikan yang diikutinya. Ditinjau dari segi pendidikan, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) yaitu sebanyak 46 %, berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) 31 % dan yang paling sedikit persentasenya adalah tingkat

pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 23 %. Hal ini menggambarkan bahwa semua peternak yang mendapat program pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen sudah mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis.

Status perkawinan responden dilihat dari hubungan ikatan perkawinan responden dengan pasangan hidupnya. Termasuk dalam status perkawinan yang dimaksud adalah cerai mati ataupun cerai hidup. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden berstatus kawin atau pernah kawin (cerai). Responden yang berstatus kawin mencapai 91 % sedangkan sisanya 9 % berstatus cerai.

### 3). Jumlah Anggota Keluarga dan Lapangan Pekerjaan

Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya angka keluarga dalam satu kepala keluarga atau rumah tangga. Setiap anggota keluarga sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab responden sebagai kepala keluarga. Dari data yang ada, sebagian besar responden mempunyai jumlah anggota keluarga sebanyak 6-9 orang. Secara rinci data jumlah anggota keluarga dapat digambarkan berikut.

Tabel 6. Distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga responden

Jumlah anggota keluarga (orang)	Frekuensi	Persen (%)
2-4	13	30
5-7	19	42
8-10	8	17
11-13	5	11
JUMLAH	45	100

Ukuran keluarga merupakan jumlah anggota yang menjadi tanggungan suatu keluarga atau banyaknya anggota keluarga responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 13 KK memiliki tanggungan keluarga 2-4 orang (catur warga) dan 19 KK (42 %) responden memiliki anggota keluarga 5-7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan anggota keluarga  $\leq 4$  tergolong dalam keluarga sederhana atau catur warga, sedangkan keluarga dengan anggota  $\geq 5$  orang maka tergolong dalam keluarga besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak responden yang mempunyai pekerjaan utama atau pekerjaan sampingannya sebagai peternak. Adapun rincian pekerjaan responden terdistribusi dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Utama		Sampingan	
	Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
Peternak	20	44	25	56
Petani	8	18	10	22
Jualan	9	20	-	-
Lain-lain	8	18	10	22
Jumlah	45	100	45	100

Data diatas menunjukkan bahwa profesi responden sebagian besar adalah peternak. Sekitar 22% dari total responden tidak memiliki pekerjaan sampingan dan hanya sebagian kecil dari responden yang memiliki pekerjaan utamanya berjualan.

### c. Kesejahteraan Keluarga Peternak

Ukuran objektif kesejahteraan keluarga peternak dilihat berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan sesudah mendapat pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen tercermin dalam indikator determinan kesejahteraan keluarga peternak sapi. Indikator-indikator tersebut dituangkan dalam 14 item pernyataan. Setiap item pernyataan tersebut mempunyai nilai skor antara 1 s/d 5 yang diadarkan pada 45 responden. Oleh karena itu, total skor untuk setiap pilihan jawaban responden adalah skor sangat rendah (630), rendah (1260), sedang/cukup (1890), tinggi (2520), dan sangat tinggi (3150).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil jawaban responden terhadap item-item kesejahteraan keluarga sebelum pemberdayaan PEMK diperoleh jumlah total nilai skor 2109. Nilai skor tersebut berada antara nilai 1890 s/d 2520 yang bermakna bahwa tingkat kesejahteraan keluarga peternak sebelum pemberdayaan PEMK di kabupaten Bireuen berada dalam kategori sedang sampai tinggi.



d. Kesejahteraan Keluarga Peternak setelah pemberdayaan PEMK

Gambaran hasil penelitian tentang kesejahteraan keluarga peternak setelah memperoleh pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman di Kabupaten Bireuen secara rinci dapat diketahui bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total nilai skor jawaban responden untuk determinan kesejahteraan keluarga setelah pemberdayaan PEMK di Bireuen adalah 2139. Ternyata nilai ini berada pada tingkat kesejahteraan keluarga antara sedang (cukup) dan tinggi. Artinya, tingkat kesejahteraan keluarga peternak sesudah mendapat pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen adalah sama saja dibandingkan dengan sebelum mendapat pemberdayaan yaitu berkisar antara sedang dan tinggi.

e. Pengaruh Pemberdayaan terhadap Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan berkaitan erat dalam mencapai kesejahteraan hidup dan cenderung dengan cara meningkatkan pendapatan. Program pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) memiliki strategi pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberi bantuan usaha ekonomi produktif. Pada hakikatnya program pembangunan tersebut bertumpu pada peran serta masyarakat gampong. Maka program pemberdayaan PEMK diharapkan memberi pengaruh dan memiliki hubungan terhadap kesejahteraan keluarga. Untuk mengukur pengaruh tersebut digunakan analisis statistik non parametrik dikarenakan data penelitian ini merupakan data ordinal dengan skala interval.

Untuk menguji pengaruh pemberdayaan dengan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui uji Wilcoxon Match Pairs Test sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Hasil analisis statistik memperlihatkan bahwa nilai probabilitas uji dua pihak (2-tailed P) berdasarkan prosedur Uji Wilcoxon adalah sebesar 0,315 ( $P > 0,05$ ). Dengan demikian data-data yang diperoleh menolak hipotesis  $H_1$  yang bermakna bahwa tingkat kesejahteraan peternak sebelum dan sesudah mendapat pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman di Kabupaten Bireuen tidak nyata. Hal ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan peternak sebelum mendapat pemberdayaan pengemba-

ngan ekonomi masyarakat kemukiman di Kabupaten Bireuen adalah sama dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan keluarga mereka sesudah mendapat pemberdayaan tersebut.

f. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan sesudah mendapat program pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen adalah tidak berbeda nyata. Dengan lain perkataan program pemberdayaan PEMK tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga peternak yang mendapat program tersebut, meskipun pihak PEMK telah menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dalam mendukung program pemerintah. Hasil penelitian serupa yang dilakukan Andriani, et al. (2008) tentang peran gender terhadap kesejahteraan keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga contoh, yaitu 82-84 persen keluarga petani padi termasuk dalam kategori tidak sejahtera. Hasil uji beda pada menunjukkan tidak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan subjektif yang dirasakan oleh keluarga petani akibat tindakan yang difasilitasi faktor terkait gender. Menurut Shalfiah (2013) sebagai pemandu atau fasilitator, Penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok.

Hal ini dikarenakan jumlah sapi yang dibantu untuk setiap keluarga hanya 1 (satu) ekor saja dengan nilai dasar (modal dasar) berkisar antara Rp. 5.500.000 sampai Rp 6.500.000. Bentuk bantuan yang diberikan adalah sapi yang menurut informasi dari peternak berkualitas rendah sehingga mengakibatkan ternak tersebut sering mengalami gangguan kesehatan bahkan mati.

Hasil penjualan sapi setelah dipelihara selama 6 (enam) bulan. rata-rata berharga Rp 7.500.000. Dengan demikian keuntungan usaha peternak selama 6 (enam) bulan adalah Rp 1.000.000, atau Rp 166.666 per bulan. Dari keuntungan tersebut dibagi lagi kepada program pembangunan kemukiman sebesar 25% dan kepeternak sendiri 75%. Dengan demikian pendapatan bersih peternak dari usaha penggemukan sapi dari program PEMK ini adalah Rp. 125.000 per bulan. Jumlah penerimaan peternak dari hasil penggemukan sapi ini sangat jauh dari

standar upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan yaitu sekitar Rp. 1.500.000 per bulan.

Hal lain yang diduga menjadi penyebab kurangnya kesejahteraan keluarga peternak dari program pemberdayaan ini adalah karena kurang cermatnya penetapan calon penerima bantuan PEMK ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerima bantuan merupakan komunitas yang memiliki kapasitas hidup sedang sampai tinggi sehingga bantuan kurang memberi pengaruh karena bukan termasuk golongan keluarga disfungsi sosial (miskin). Kenyataan ini ditunjukkan dari hasil pengamatan yang memperlihatkan bahwa hanya 20% saja dari responden yang mempunyai profesi sebagai peternak. Sedangkan yang lainnya menjadikan usaha penggemukan sapi ini sebagai usaha atau pekerjaan sampingan. Dengan lain perkataan sasaran penerima bantuan PEMK kurang tepat karena lebih banyak penerima bantuan sapi ditangan yang bukan keluarga peternak sehingga bantuan tidak efektif dan tidak *sustainable*.

Hubungan pemberdayaan dengan kesejahteraan keluarga pada program pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman tidak memberi pengaruh nyata juga dikarenakan ada sebagian (10%) peternak yang tidak mau menjual sapi bantuan tersebut sehingga tidak mendapat kesempatan usaha bagi keluarga lain. Dalam kasus lain juga diketahui ada peternak (35%) tidak mau menyerahkan modal dasar untuk dibeli sapi lain untuk digilirkan kepada peternak lain.

Bila dilihat dari aspek tanggungan keluarga, diketahui bahwa 42% dari responden mempunyai tanggungan keluar yang besar yaitu 5-7 orang per rumah tangga. Bila dibandingkan dengan pendapatan dari usaha penggemukan sapi sebagaimana yang ditunjukkan dari pembahasan sebelumnya (Rp 125.000/bulan), maka sangat jelas pendapatan peternak sejumlah itu mustahil dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang relatif besar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ananda (2010), bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan adalah faktor gaji/penghasilan.

#### 4. Simpulan

Tingkat kesejahteraan keluarga peternak sebelum dan sesudah mendapat program

pemberdayaan PEMK di Kabupaten Bireuen berada dalam kategori sedang sampai tinggi. Kesejahteraan peternak sebelum dan sesudah mendapat pemberdayaan pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman di Kabupaten Bireuen adalah sama. Dengan kata lain bahwa program PEMK berpengaruh tidak nyata terhadap kesejahteraan keluarga peternak sapi di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat kemukiman (PEMK) berpengaruh tidak nyata terhadap kesejahteraan keluarga peternak di Kabupaten Bireuen.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad, (2000). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Andist. (2008). *Pengertian Kemiskinan..* Bandung : STKS Bandung.
- Ananda, P.A. (2010). Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Karyawan di PTPN IV Kebun Air Batu. *Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan*
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, (2007). *Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman (PEMK)*. Kabupaten Bireuen.
- Badan Pusat Statistik. *Bireuen Dalam Angka 2009*. BPS Kabupaten Bireuen
- Badan Pusat Statistik. *Jeumpa Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Bireuen
- Badan Pusat Statistik. *Peusangan Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Bireuen
- Badan Pusat Statistik. *Samalanga Dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Bireuen
- Badan Pusat Statistik, 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2007*. Jakarta.
- Djarwanto, (1996). *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*. Yogyakarta : Liberty.
- Kuncoro, (2004). *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Blantika Mizan.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Edy, (2007). *Aceh Menembus Batas*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan NAD.

- Robbins, S.P. (2004). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta : Prenahalindo.
- Rudito, Bambang, (2003). *Akses Peran serta Masyarakat*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Shalfiah, R. (2013). Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah kota bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan* , 1 (3): 975- 984
- Andriani, R., B. Kusumo, E. Sunarti, dan D. K. Pranadji. (2008). Analisis peran gender serta hubungannya dengan kesejahteraan keluarga petani padi dan horti kultura di daerah pinggiran perkotaan. *Jurnal. Media Gizi & Keluarga, Desember 2008*, 32 (2): 52-64
- Siahaan, N.H.T, (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Administrasi* . Bandung : ALFABETA
- Suharsimi Arikonto, (1994). *Manajemen Penelitian*, Bandung ; Remaja Karya.
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung.
- Suharto. (2004). Pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin. dari <http://www.policy.hu/suharto/modula/makindo 32.htm>
- Suharto, Edi dkk. (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKS Press.

#### Riwayat Penulis:

##### **Dr. Cut Khairani, M.Si**

Lahir di Aceh Barat Daya, 1 Februari 1968. Adalah Dosen FISIP Universitas Almuslim yang juga Wakil Dekan I Bidang Akademik. NIDN: 0101026804. Dokter Bidang Ilmu Sosial Politik di Universitas Merdeka Malang.